

# Audit Committee Governance: Evidence From Indonesia

Mochamad Muslih

STIE Tri Bhakti

Mochamadmuslih@stietribhakti.ac.id

**Abstrak:** Peran komite audit di Indonesia semakin dibutuhkan dalam rangka memperkuat peran pengawasan Dewan Komisaris pada manajemen perusahaan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk melakukan analisa terhadap kinerja operasi dan keuangan perusahaan sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan arahnya dengan lebih baik. Namun timbul pertanyaan bagaimana tata kelola Komite Audit sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan penciptaan organ Komite Audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tata kelola Komite Audit di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan survey. Populasi penelitian adalah seluruh stakeholder perusahaan yang terdiri atas direksi, manajemen, eksternal auditor, dewan komisaris, komite audit, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara random. Metode pengumpulan data dilakukan secara on line dengan menggunakan google forms. Link kuesioner diedarkan kepada para respondent yang terdiri atas seluruh stakeholders perusahaan. Sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) responden mengisi link tersebut. Hasil rekapitulasi survey menunjukkan tata kelola yang diperlukan untuk Komite Audit di Indonesia. Disarankan agar pengaturan tentang komite audit di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan ke tujuh hasil survey yang berada di atas rata-rata pilihan responden.

**Kata kunci:** Komite Audit, Dewan Komisaris, Tata Kelola Komite Audit.

**Abstract:** The role of the audit committee in Indonesia is increasingly needed in order to strengthen the supervisory role of the Board of Commissioners in company management. The Audit Committee assists the Board of Commissioners to analyze the company's operational and financial performance so that the Board of Commissioners can provide better direction. However, the question arises what characteristics the Audit Committee must have so that it can carry out its duties properly and achieve the objectives of creating the Audit Committee organ. The purpose of this research is to study the characteristics required by the Audit Committee in Indonesia. The method used is a qualitative method with a survey approach. The study population was all company stakeholders consisting of directors, management, external auditors, board of commissioners, audit committee and other stakeholders in Indonesia. Sample selection is done randomly. The data collection method is done on line using google forms. The questionnaire link is circulated to the respondent which consists of all company stakeholders. A total of 132 (one hundred and thirty two) respondents filled in the link. The results of the survey recapitulation show the composition of the characteristics required by the Audit Committee in Indonesia. It is recommended that the recruitment of the Audit Committee in Indonesia pay attention to these characteristics so that it will significantly boost the performance of companies in Indonesia.

**Keywords:** *Audit Committee, Board of Commissioners, Characteristics of the Audit Committee.*

## **1. PENDAHULUAN**

Komite Audit merupakan bagian penting dari organ Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite Audit melakukan analisa terhadap berbagai aspek perusahaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas Komite Audit sangat tergantung pada kualifikasi yang dimilikinya dan rapat-rapat pembahasan yang dilakukannya.

Peraturan tentang Komite Audit sebagai organ pendukung komisaris telah ditetapkan mulai tahun 2012. Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk mendorong kinerja BUMN. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang Komite Audit pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur bukan hanya karakteristik komite audit tetapi juga tata kelola komite audit secara keseluruhan dalam berbagai pasal yang terpisah. Peraturan kementerian BUMN tentang komite audit dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tekanan yang berbeda pada beberapa parameter tata kelola komite audit. Kewajiban menerapkan tata kelola perusahaan sebenarnya telah dimulai di Indonesia dengan adanya peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Namun belum diteliti apakah parameter-parameter yang seharusnya untuk tata kelola komite audit di Indonesia.

Telah banyak penelitian tentang karakteristik komite audit pada umumnya dan karakteristik komite audit di Indonesia. Zhou, Owusu-Ansah, dan Maggina (2018) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa tidak ada hubungan antara Komite Audit dengan kinerja perusahaan. Al Qatamin (2018) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa ukuran Komite Audit, independensi Komite Audit, dan keragaman gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun pengalaman dan jumlah pertemuan ternyata tidak berpengaruh pada kinerja. Madi, Ishak, dan Manaf (2014) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa independensi Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan jabatan yang banyak dari Komite Audit berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan sukarela perusahaan. Keahlian keuangan dan jumlah pertemuan Komite Audit ternyata tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan sukarela perusahaan. Namun perlu juga diteliti tentang tata kelola komite audit secara keseluruhan.

## **2. LANDASAN TEORITIS**

Teori utama dari penelitian ini adalah agency theory. Agency theory mengatur hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajer tujuannya untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan dan

manajer yang menjalankan roda perusahaan. Jensen and Meckling (1976) mengatakan bahwa pemegang saham dapat meyakinkan bahwa manajer sebagai agen mengambil keputusan-keputusan yang optimal hanya bila insentif yang layak diberikan kepada para manajer dan dilakukan pemantauan secara layak kepada para manajer. Jensen and Meckling menyatakan bahwa organisasi merupakan nexus dari kontrak-kontrak. Jadi terdapat banyak kontrak manajemen dalam perusahaan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Semakin besar organisasi, maka akan semakin jauh hubungan antara pemilik dengan manajer sebagai agen perusahaan. Scott (2015, hal. 358) mengatakan bahwa agency theory mempelajari rancangan kontrak dengan tujuan untuk memotivasi agen bertindak atas nama principal. Agency theory dikemas dalam tata kelola perusahaan.

Telah banyak penelitian-penelitian mengenai manfaat tata kelola pada kinerja perusahaan. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Muslih (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya pada PT Bank BRI bahwa tata kelola perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara terus menerus. Muslih (2020) dalam hasil penelitiannya mengenai tata kelola BUMN bidang keuangan non publik menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Namun muslih (2020) pada penelitiannya mengenai kebijakan pembiayaan dan investasi pada perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa tata kelola tidak memperkuat pengaruh keputusan pendanaan dan keputusan investasi pada kinerja perusahaan.

Komite Audit merupakan organ pendukung dewan komisaris, jadi merupakan bagian dari tata kelola perusahaan. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.05/2014 disebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Pada pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 disebutkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang terdiri dari ketua dan anggota. Pada pasal 18 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 disebutkan bahwa organ pendukung dewan komisaris terdiri dari sekretariat dewan komisaris bila diperlukan, komite audit, dan komite lainnya bila diperlukan.

Secara historis menurut Al-Baidhani (2016) konsep komite audit pertama kali diperkenalkan tahun 1939 oleh New York Stock Exchange. Ketika terjadi krisis global tahun 1970, kebutuhan akan komite audit semakin terasa. Tahun 1972 Securities Exchange Commission Amerika yang pertama kali merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Tahun 1977 NYSE mewajibkan bahwa semua anggota komite audit adalah direktur independen. Tahun 1988 AICPA mengeluarkan Statement on Auditing Standard No. 61 tentang komunikasi dengan komite audit, yang mengatur hubungan antara komite audit, auditor eksternal, dan manajemen. Setelah terjadinya kasus Enron dan World Com, Kongress Amerika mengeluarkan Sarbane Oxley Act tahun 2002, yang memberikan kekuasaan yang lebih besar pada komite audit, terutama di bidang whistleblowing dan syarat-syarat pengungkapan pada Laporan Keuangan. Sarbane Oxley Act tahun 2002 telah meningkatkan tanggungjawab dan kewenangan komite audit; tanggungjawab keanggotaan meningkat dan komposisi komite audit harus mencakup lebih banyak direktur independen.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 menyebutkan bahwa dasar pertimbangan dibentuknya komite audit adalah karena semakin kompleksnya tugas dan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik sehingga perlu komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris. Pada ketentuan umum Surat Keputusan Ketua Bapepam tersebut didefinisikan bahwa komite audit adalah komite

yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Lebih lanjut disebutkan pada ketentuan umum bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Ketua komite audit adalah komisaris independen.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal; menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal; memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap semua informasi yang dikeluarkan perusahaan; melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya. Al-Baidhani (2016) menyatakan bahwa Corporate Governance merupakan sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Lebih lanjut Al Baidhani mengatakan bahwa Komite Audit menjalankan peran sebagai perwakilan Dewan Komisaris, darimana ia memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tanggungjawab tata kelolanya, termasuk pengarahan dan pemantauan pelaporan keuangan organisasi, pengungkapan, audit internal dan eksternal, sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan, dan kegiatan-kegiatan manajemen resiko. Komite Audit memberikan Dewan Komisaris saran-saran yang diperlukan untuk mengarahkan perusahaan.

Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Pada pasal 15 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 ditetapkan bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan; tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan; mampu berkomunikasi secara efektif; dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit. Paramitha dan Rahardjo (2013) mengatakan bahwa baik buruknya kinerja atau kualitas Komite Audit mungkin juga dipengaruhi oleh karakteristik Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan keahlian Komite Audit, dalam ketentuan umum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 ditetapkan bahwa anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan public; bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan; wajib memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Nuresa dan Hadiprajitno (2013) mengatakan bahwa Komite Audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif.

Dalam penelitiannya (2015) Tusek menyimpulkan bahwa efisiensi fungsi internal audit perusahaan dapat ditingkatkan dengan memasukan fungsi internal audit kedalam kegiatan-kegiatan Komite Audit. Badhabi dan Ismail menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa peranan Komite Audit dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan

meningkatkan nilai perusahaan sangat penting. Akpey dan Azembila (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa Komite Audit yang independent dan memiliki keahlian keuangan mengurangi tingkat manajemen laba. Al-Baidhani (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa dewasa ini komite audit memainkan peranan penting dalam tata kelola perusahaan, terutama mengenai pengendalian arah perusahaan dan pertanggungjawabannya.

Rupley, Almer, dan Philbrick (2011) melakukan penelitian dengan metode survey terhadap 1000 anggota Komite Audit yang dipilih secara random dari Audit Analytics database. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan terstruktur dan terbuka. Hasil dari pertanyaan terbuka mengenai efektifitas Komite Audit menunjukkan bahwa pengetahuan anggota Komite Audit (25 %), ketersediaan waktu (19 %), komunikasi terbuka dengan manajemen puncak (11 %), dan ketajaman bisnis (10 %). Jadi pengetahuan anggota Komite Audit dianggap yang paling penting untuk mendukung efektifitas komite audit. Ghafran dan O'Sullivan (2017) melakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap kualitas audit. Hasilnya menunjukkan bahwa keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut hasil penelitian Badolato, Donelson, dan Ege (2014) status relatif dan keahlian keuangan komite audit menghambat adanya manajemen laba.

Mengenai pertemuan Komite Audit, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 menetapkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota; keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat. Al Baidhani (2016) mengatakan bahwa pertemuan Komite Audit memberikan pengaruh utama pada evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan fungsi pengendalian intern perusahaan. Muatan penting dari pertemuan Komite Audit menurut Al-Baidhani adalah frekuensi pertemuan, kehadiran anggota, dan materi atau topik pertemuan.

Dalam pertemuan komite audit dilakukan berbagai kajian dan pembahasan mengenai perusahaan dalam berbagai aspek seperti aspek keuangan, akuntansi, manajemen resiko, teknologi informasi, dan tata kelola perusahaan. Sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri BUMN No. 12 tahun 2012 dan Keputusan Kepala Bapepam No. Kep-643 tahun 2012 maka setiap rapat komite audit harus dituangkan dalam risalah rapat. Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan arahan Dewan Komisaris terhadap manajemen perusahaan dan pemantauannya. Jadi rapat komite audit akan berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Nuresa dan Hadiprajitno (2013) mengatakan bahwa komite audit yang mengadakan pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif. Fitzgerald dan Giroux (2014) melakukan penelitian pada pemerintah kota di Amerika yang berpenduduk lebih dari 100.000 penduduk. Penelitian ini dilakukan setelah Sarbanes-Oxley Act 2002 dimana tidak diwajibkan bagi pemerintah kota di Amerika untuk memiliki komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 58 % dari Pemerintah Kota di Amerika Serikat memiliki komite audit. Keberadaan komite audit pada pemerintah kota karena dirasakan perlunya komite audit untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota. Tusek (2015) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa efisiensi fungsi internal audit dapat ditingkatkan dengan memasukan secara aktif fungsi internal audit dalam kegiatan-kegiatan komite audit. Pertemuan atau rapat antara komite audit dengan internal audit merupakan salah satu kegiatan yang penting dari komite audit. Sujatha, Muninarayanappa, dan Sathyanarayana (2017) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa jumlah pertemuan Komite Audit memperbaiki kinerja beberapa mekanisme governance. Hal ini mungkin karena adanya deteksi dini dari penggelapan Laporan Keuangan dan penyajian posisi keuangan aktual dihadapan Dewan Komisaris. Badhabi dan Ismail menyimpulkan dari

hasil penelitiannya bahwa komitmen anggota Komite Audit dalam menghadiri pertemuan Komite Audit merupakan karakteristik Komite Audit yang paling penting dan merupakan factor utama untuk tercapainya efektifitas Komite Audit dan sangat dihargai oleh pasar saham di Oman. Akpey dan Azembila (2016) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa frekuensi pertemuan Komite Audit berhubungan dengan penurunan tingkat keagresifan manajemen laba. Ghafran dan Sullivan (2017) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa keahlian komite audit meningkatkan kualitas audit. Peningkatan kualitas audit akan meningkatkan kinerja perusahaan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan survey. Populasi penelitian adalah seluruh stakeholder perusahaan yang terdiri atas direksi, manajemen, eksternal auditor, dewan komisaris, komite audit, dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara random. Sampelnya adalah para pemangku kepentingan perusahaan. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan menggunakan kuesioner on line yang terdapat pada software google forms. Dimensi yang dibangun dalam kuesioner meliputi 8 parameter kunci tata kelola komite audit. Setiap pertanyaan terdiri atas pilihan 4 (empat) skala likert yaitu 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (setuju), dan 4 (sangat setuju). Jawaban rata-rata minimal 3 (tiga) menunjukkan jawaban yang baik dan dianggap merupakan parameter tata kelola yang cocok untuk tata kelola komite audit di Indonesia. Sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) responden mengisi kuesioner on line yang di edarkan secara random pada pemangku kepentingan perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan
1	Adanya komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas Corporate Governance.
2	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit.
3	Adanya anggota Komite Audit dengan financial expertise yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan.
4	Adanya Komite Audit Independen dalam Organ Komite Audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals
5	Akses Komite Audit pada manajemen perusahaan dan internal serta external auditor akan mengurangi fraud
6	Adanya kewajiban Auditor Eksternal untuk mengevaluasi efektivitas Komite Audit sebagai bagian dari assessmen sistem pengendalian intern perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit
7	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas Komite Audit.
8	Peningkatan jumlah pertemuan atau rapat Komite Audit akan mengurangi fraud, mengurangi kemungkinan penggantian auditor yang mencurigakan, dan mengurangi kemungkinan penggunaan auditor-auditor spesialis seperti IS Audit.

*HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN*

*Hasil Penelitian*

Rekapitulasi pengisian kuesioner yang dilakukan oleh para responden menunjukkan hasil seperti di bawah ini.

<b>REKAPITULASI HASIL SURVEY KOMITE AUDIT</b>						
<b>No.</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>SKOR</b>
<b>6</b>	Adanya komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas Corporate Governance	<b>1,00</b>	<b>2,10</b>	<b>53,40</b>	<b>43,50</b>	<b>3,39</b>
<b>3</b>	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>65,20</b>	<b>32,60</b>	<b>3,29</b>
<b>2</b>	Adanya anggota Komite Audit dengan financial expertise yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan	<b>1,00</b>	<b>2,80</b>	<b>63,60</b>	<b>32,60</b>	<b>3,28</b>
<b>1</b>	Adanya Komite Audit Independen dalam Organ Komite Audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals.	<b>1,00</b>	<b>5,10</b>	<b>60,60</b>	<b>33,30</b>	<b>3,26</b>
<b>5</b>	Akses Komite Audit pada manajemen perusahaan dan internal serta external auditor akan mengurangi fraud	<b>1,60</b>	<b>8,30</b>	<b>63,60</b>	<b>26,50</b>	<b>3,15</b>
<b>8</b>	untuk mengevaluasi efektivitas Komite Audit sebagai bagian dari assessmen sistem pengendalian intern perusahaan	<b>1,00</b>	<b>5,80</b>	<b>71,20</b>	<b>22,00</b>	<b>3,14</b>
<b>4</b>	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas Komite Audit	<b>1,50</b>	<b>15,90</b>	<b>57,60</b>	<b>25,00</b>	<b>3,06</b>
<b>7</b>	Peningkatan jumlah pertemuan atau rapat Komite Audit akan mengurangi fraud, mengurangi kemungkinan penggantian auditor yang mencurigakan, dan mengurangi kemungkinan penggunaan auditor-auditor spesialis seperti IS Audit	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>63,60</b>	<b>15,90</b>	<b>2,95</b>

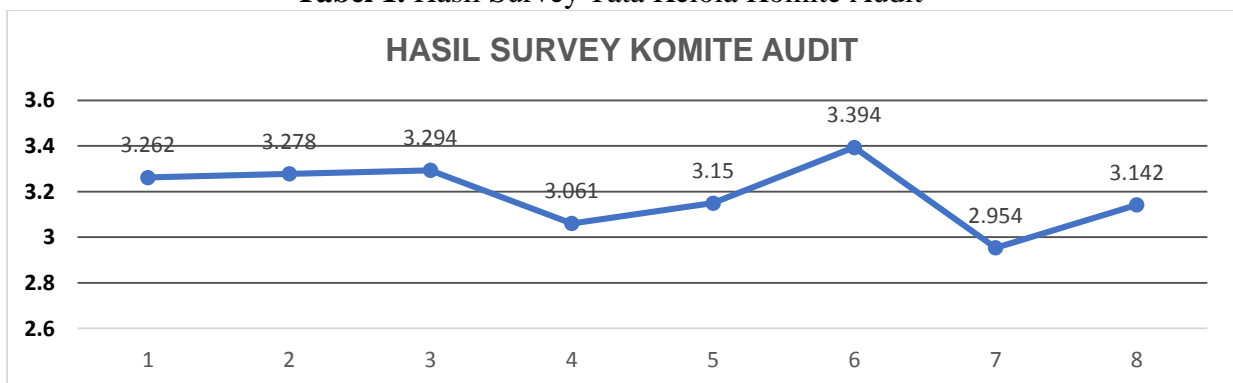
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa urutan atau peringkat karakteristik komite audit berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh seluruh responden adalah sebagai berikut:

No.	Karakteristik Komite Audit	Peringkat	SKOR
1	Adanya komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas Corporate Governance.	1	3,39
2	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit.	2	3,29
3	Adanya anggota Komite Audit dengan financial expertise yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan.	3	3,28
4	Adanya Komite Audit Independen dalam Organ Komite Audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals	4	3,26
5	Akses Komite Audit pada manajemen perusahaan dan internal serta external auditor akan mengurangi fraud	5	3,15
6	Adanya kewajiban Auditor Eksternal untuk mengevaluasi efektivitas Komite Audit sebagai bagian dari assessmen sistem pengendalian intern perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit	6	3,14
7	Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas Komite Audit.	7	3,06
8	Peningkatan jumlah pertemuan atau rapat Komite Audit akan mengurangi fraud, mengurangi kemungkinan penggantian auditor yang mencurigakan, dan mengurangi kemungkinan penggunaan auditor-auditor spesialis seperti IS Audit.	8	2,95

*Pembahasan*

Grafik hasil survey dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Survey Tata Kelola Komite Audit





Terdapat 8 (delapan) parameter atau pertanyaan yang diuji berdasarkan pendapat para ahli tentang tata kelola yang baik mengenai komite audit. Ke delapan parameter tersebut bukan hanya tentang karakteristik komite audit, tetapi juga tentang mekanisme kerja yang ideal buat komite audit. Parameter yang dianggap penting bila capaian hasil surveynya minimal 3. Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar capaian parameter komite audit berada di atas 3. Hanya 1 (satu) parameter yang berada di bawah 3 yaitu parameter peningkatan jumlah pertemuan atau rapat komite audit akan mengurangi fraud, mengurangi kemungkinan penggantian auditor yang mencurigakan, dan mengurangi kemungkinan penggunaan auditor-auditor spesialis seperti Information System Audit.

Parameter yang capaiannya di atas rata-rata merupakan parameter utama tata kelola komite audit yang dianggap ideal di Indonesia. Capaian skor rata-rata adalah 3,19. Terdapat 4 (empat) parameter yang berada di atas rata-rata. Jadi parameter utama dari tata kelola yang diharapkan dari organ komite audit di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas Corporate Governance.
2. Kewenangan Komite Audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas Komite Audit.
3. Adanya anggota Komite Audit dengan financial expertise yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan.
4. Adanya Komite Audit Independen dalam Organ Komite Audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals.

Empat parameter tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.** Parameter Utama Komite Audit



Keempat parameter tersebut di atas saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Adanya komite audit yang independen dengan financial expertise yang memadai yang diberi kewenangan yang memadai dan difasilitasi dengan komunikasi yang terstruktur akan membentuk tata kelola komite audit yang efektif dan efisien.

Parameter “adanya komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas corporate governance” merupakan parameter terpenting dalam tata kelola komite audit. Internal Audit merupakan salah satu organ dalam manajemen

perusahaan yang berfungsi untuk memberikan jasa konsultasi dan assurance dalam perusahaan. Dengan adanya jasa konsultansi maka manajemen akan mendapat usulan solusi dari internal audit terhadap hambatan dalam pelaksanaan operasi-operasinya. Internal audit juga akan melakukan audit terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan, termasuk pengelolaan manajemen resiko perusahaan. Menurut IIA position paper 2013, Internal audit merupakan salah satu 3 defense of lines, yang terdiri atas unit pemilik resiko, unit yang mengelola resiko, dan internal audit. Bila komite audit melakukan komunikasi yang terstruktur dengan internal audit maka akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan bagi ke dua belah pihak. Komite audit akan memperoleh data yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk melakukan analisa terhadap capaian operasi-operasi perusahaan dan menginformasikannya kepada Dewan Komisaris. Internal audit juga akan memperoleh masukan dan arahan yang lebih cepat dari Dewan Komisaris melalui komite auditnya sehingga langkah-langkah tindak lanjut dapat cepat dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Parameter “adanya kewenangan komite audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas komite audit” merupakan parameter urutan ke dua dalam tata kelola komite audit. Parameter ini menunjukkan bahwa kewenangan komite audit untuk dapat mengawasi seluruh capaian keuangan perusahaan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang. Capaian jangka panjang meliputi capaian atas rencana operasi jangka pendek perusahaan dan capaian atas anggaran tahunan perusahaan. Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis Malcolm Baldrige Criteria (MBC) yang disebut Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang di atur pada keputusan Kementerian BUMN nomor Surat Keputusan Nomor S-08.MBU/2013 tanggal 16 Januari tahun 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komite audit harus diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi atas capaian-capaian manajemen tersebut. Terhadap setiap capaian yang ingin dievaluasinya, komite audit harus dapat memperoleh data-data dasarnya.

Parameter “adanya anggota komite audit dengan keahlian keuangan yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan” merupakan parameter urutan ke tiga berdasarkan pilihan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan dari komite audit merupakan urutan ketiga terpenting untuk suksesnya pelaksanaan tugas oleh komite audit. Keahlian keuangan dan audit mutlak dimiliki oleh anggota komite audit sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengevaluasi kinerja operasi dan kinerja keuangan. Keahlian keuangan dan audit yang dimiliki oleh komite audit memungkinkan komite audit untuk mengevaluasi operasi-operasi dan capaian kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Parameter “adanya komite audit independen dalam organ komite audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals” merupakan parameter urutan ke empat terpenting berdasarkan pilihan responden. Adanya komite audit yang independen dari pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas akan membuat analisa-analisanya atas capaian kinerja operasi dan keuangan perusahaan independen dari semua kepentingan yang ada di perusahaan. Analisa yang independen akan memperbaiki kualitas arahan dewan komisaris pada manajemen perusahaan, terutama mengenai sistem pengendalian intern dan pelaporan keuangan.

Parameter “adanya akses komite audit pada manajemen perusahaan dan internal serta external auditor akan mengurangi fraud” merupakan parameter urutan ke lima terpenting berdasarkan pilihan responden. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka komite audit harus memiliki akses pada manajemen perusahaan sehingga dapat meminta berbagai laporan kinerja perusahaan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan sehingga dapat melakukan berbagai evaluasi yang diperlukan atas capaian-capaian perusahaan. Akses komite audit pada manajemen perusahaan merupakan keharusan untuk dapat memperoleh berbagai data yang diperlukan dan informasi-informasi atau data penting yang harus ditanyakan kepada manajemen. Informasi yang harus ditanyakan misalnya capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara. Arahan-arahan dari dewan komisaris juga akan lebih mudah dan lebih cepat disampaikan bila komite audit memiliki akses pada manajemen perusahaan.

Komite audit juga harus memiliki akses pada internal auditor perusahaan sehingga dapat saling bersinerji dan mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing. Akses komite audit pada auditor eksternal juga akan mempermudah pelaksanaan tugas komite audit melakukan berbagai analisa dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris. Di Badan Usaha Milik Negara biasanya kegiatan pemeriksaan oleh auditor eksternal di dampingi oleh komite audit BUMN yang sedang di audit. Sinergi ini memberi manfaat bagi komite auditnya dan juga auditor eksternal perusahaan. Komite audit dapat mengetahui hasil audit eksternal lebih dini dan memberi masukannya kepada dewan komisaris, sedangkan auditor eksternal lebih terfasilitasi kegiatan auditnya dengan didampingi komite audit. Dengan demikian akses komite audit pada auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas komite audit.

Parameter “adanya kewajiban auditor eksternal untuk mengevaluasi efektivitas komite audit sebagai bagian dari assessmen sistem pengendalian intern perusahaan akan meningkatkan efektifitas komite audit” merupakan parameter urutan ke enam berdasarkan pilihan para responden. Komite audit merupakan bagian dari organ dewan komisaris. Jadi merupakan juga bagian dari organ tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Bila secara periodik dilakukan audit maka kelauman pada tata kelola komite audit dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan. Audit yang dapat menyangkut organ komite audit adalah audit tata kelola perusahaan, audit sistem pengendalian intern, dan audit atas manajemen resiko perusahaan. Kekurangan yang mungkin terdapat pada tata kelola komite audit sebagai hasil dari audit yang dilakukan misalnya kurangnya jumlah pertemuan komite audit, belum lengkapnya notulen-notulen rapat komite audit, kurangnya arahan dewan komisaris, dan kurangnya kehadiran komite audit pada rapat-rapat komite audit, rapat-rapat dewan komisaris, dan rapat dewan komisaris dengan direksi perusahaan. Hasil audit biasanya akan dibahas dalam exit meeting hasil audit. Tindak lanjut hasil audit dipantau secara periodik oleh Unit Internal Audit Kantor Pusat dan Unit Internal Audit perusahaan yang bersangkutan. Dengan mekanisme ini maka tata kelola komite audit akan terus meningkat.

Parameter “adanya kewenangan komite audit untuk mengawasi auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas komite audit” merupakan parameter urutan ke tujuh berdasarkan hasil penelitian. Komite audit harus melakukan pengawasan terhadap auditor eksternal. Tujuannya adalah agar auditor eksternal yang terpilih memang layak secara teknis sesuai dengan tujuan recruitmennya dan wajar harganya. Parameter tata kelola perusahaan di Badan Usaha Milik Negara memang telah mencantumkan kewajiban bagi Komite Audit untuk mengusulkan nama auditor eksternal dan harga jasanya kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris perusahaan. Selanjutnya setelah audit dilakukan oleh auditor eksternal dan telah diterbitkan laporan hasil audit, maka komite audit harus melakukan evaluasi terhadap hasil audit auditor eksternal dan melaporkannya kepada dewan komisaris perusahaan.

Auditor eksternal melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor eksternal meliputi laporan atas kelayakan laporan keuangan perusahaan, laporan hasil audit ketaatan, dan laporan hasil audit atas sistem pengendalian intern. Ketiga laporan tersebut harus di analisa oleh komite audit dan memberikan masukan kepada dewan komisaris.

Parameter “adanya peningkatan jumlah pertemuan atau rapat komite audit akan mengurangi fraud, mengurangi kemungkinan penggantian auditor yang mencurigakan, dan mengurangi kemungkinan penggunaan auditor-auditor spesialis seperti Information System Audit” merupakan parameter urutan ke 8 (delapan) berdasarkan capaian hasil penelitian. Capaian parameter ini berdasarkan hasil penelitian berada dibawah rata-rata hasil survey dan berada dibawah skor 3 (tiga). Ini berarti bahwa parameter ini dianggap kurang penting berdasarkan hasil penelitian. Jumlah capaian hasil penelitian parameter ini memang di anggap kurang penting, tetapi masih termasuk dalam kategori cukup. Jadi parameter ini seyogyanya masih tetap harus diperhatikan dalam tata kelola komite audit. Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 ditetapkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota; keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat. Al Baidhani (2016) mengatakan bahwa pertemuan Komite Audit memberikan pengaruh utama pada evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan fungsi pengendalian intern perusahaan. Pada pasal 13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sedangkan Permen BUMN No. 12 tahun 2012 menetapkan bahwa komite audit mengadakan pertemuan minimal sama dengan jumlah pertemuan dewan komisaris dengan direksi perusahaan. Dengan demikian peraturan komite audit yang ada saat ini masih menganggap jumlah pertemuan komite audit penting dalam tata kelola komite audit.

## *SIMPULAN DAN SARAN*

### *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, tata kelola komite audit yang penting untuk dipenuhi sehingga dapat mencapai tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terstruktur antara Komite Audit dengan Internal Audit akan meningkatkan kualitas corporate governance.
2. Kewenangan komite audit untuk mengawasi pelaporan keuangan perusahaan akan meningkatkan efektifitas komite audit.
3. Anggota komite audit dengan financial expertise yang berpengalaman di bidang akuntansi, auditing, dan finance akan mengurangi kemungkinan adanya kelemahan internal control, mengurangi kemungkinan adanya financial reporting problems, dan mengurangi kemungkinan adanya penggantian auditor yang mencurigakan.
4. Komite audit independen dalam organ komite audit akan mengurangi adanya kelemahan internal control, mengurangi fraudulent financial reporting, dan mengurangi abnormal accruals.
5. Adanya akses komite audit pada manajemen perusahaan dan internal serta external auditor akan mengurangi fraud.
6. Adanya kewajiban auditor eksternal untuk mengevaluasi efektivitas komite audit sebagai bagian dari assessmen sistem pengendalian intern perusahaan akan meningkatkan efektifitas komite audit.
7. Adanya kewenangan komite audit untuk mengawasi auditor eksternal akan meningkatkan efektifitas komite audit.

Parameter nomor 1 sampai dengan parameter nomor 4 merupakan parameter utama untuk tata kelola komite audit di Indonesia.

### *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya tentang komite audit dengan hasil penelitian tersebut di atas.
2. Parameter-parameter hasil penelitian tersebut di atas agar digunakan untuk memperbaiki parameter pada Pedoman Assessment Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern, baik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maupun yang tidak terdaftar.
3. Literatur tentang komite audit agar disesuaikan dengan hasil penelitian tersebut di atas.

### **REFERENCE**

- [1] Adestian, Yuda. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI pada Tahun 2012-2014.
- [2] Adiati, Yashita, Adiwibowo, Agustinus Santosa. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Diponegoro Journal of Accounting, volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.
- [3] Al-Bhaidani M, Ahmed Mohsen . The Role Of Audit Committee In Corporate Governance : Descriptive Study. International Journal of Research and Methodology in Social Science Vol. 02, Quarterly Journal, ISSN. 2415-0371, April-June, 2016.
- [4] Amaliyah, Fitri, Herwiyanti, Eliada. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institutional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan.
- [5] Akpey, Ida Glover ., Azembila, Benjamin Asunka . The Effect Of Audit Committess On The Performance Of Firms Listed On The Ghana Stock Exchange. IOSR Journal of Bussiness and Management Vol.18, Issue, 11, pp. 55-62, November, 2016.
- [6] Alqatamin, Rateb Mohammad. Audit Committee Effectiveness and Company Performance: Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, Vol. 7 No. 2, 2018.
- [7] Al-Baidhani, Ahmed Mohsen. The Role of Audit Committee in Corporate Governance: Descriptive Study. Universiti Putra Malaysia (UPM).
- [8] Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- [9] Badolato, Patrick., Donelson, Dain.C., Ege, Matthew. Audit Committee Financial Expertise And Earnings Management: The Role of Status. Journal of Accounting and Economics, JAE1029, August, 2014
- [10] Badhabi, Saleh Husein Ahmad., Ismail, Ku Nor Izah. Audit Committee Characteristics And Firm Performers In Oman.
- [11] Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- [12] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

- [13] Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Bank Indonesia.
- [14] Bhagat, S., Bolton, B. *Corporate Governance and Firm Performance*. Journal of Corporate Finance 14, April 2008.
- [15] Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [16] Fitzgerald, Brian.C., Giroux, Gary.A .Voluntary Formation Of Audit Committees By Large Municipal Governments. Research In Accounting Regulation Vol. 26 (67-74), 2014.
- [17] Ghafran, Chaundry., O’Sullivan, Noel. The Impact Of Audit Committee Expertise On Audit Quality : Evidence From UK Audit Fees. The British Accounting Review ,49, 578-593, September, 2017.
- [18] Hasibuan, David HM, Sushanty,Lisa. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013 – 2014.
- [19] Irma, Amelya Dwi Ade. (2019). Pengaruh Komisaris Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property, Perumahan dan Konstruksi 2013-2017.
- [20] Jehnsen and Meckling. (1976). Theory of The Firm. Harvard Business School.
- [21] Johl, Shireenjit, Subramaniam, Nava, Zain, Mazlina Mat. (2012). *Audit Committee and CEO Ethnicity and Audit Fees*.The International Journal of Accounting.
- [22] Kementerian BUMN. (2013). Surat Keputusan Nomor S-08.MBU/2013 tanggal 16 Januari tahun 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- [23] Kementerian BUMN. (2011). Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara.
- [24] Kementerian BUMN. (2012). Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- [25] Kementerian BUMN. (2012). Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- [26] Kementerian BUMN. (2013). Surat Keputusan Nomor S-08.MBU/2013 tanggal 16 Januari tahun 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan Key Performance Indicator (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- [27] Lazaros, Anastasiadis., Sofia, Anastasiadou., George Lakovidis. (2017). *Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Dimensions In Greek Tertiary Education System*. Knowledge E Publisher, pages 436-455.
- [28] Lakatos, I. (1989). The Methodology of Scientific Research Programs. Volume 1. ISBN 0-521-28031-1, paperback. Cambridge University Press.
- [29] Lukviarman, Niki. Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. PT Era Adicitra Intermedia, Cetakan Pertama September 2016

- [30] Makhrus, Mohammad. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening: Studi Empiris Perusahaan Go Public di BEI yang mengeluarkan saham Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- [31] Madi, Hisham Kamel., Ishak, Zunaini., Manaf, Nor Azizah Abdul. The Impact Audit Committee Characteristics On Corporate Voluntary Disclosure. *International Conference on Accounting Studies, ICAS, 2014. Kuala Lumpur, Malaysia*.
- [32] Muslih, M. (2016). *Manfaat corporate governance untuk meningkatkan kinerja perusahaan*. In *Jurnal Forum Keuangan Bisnis* (Vol. 5, Issue November 2003).
- [33] Muslih, M. (2018). Pengaruh Kompensasi Komisaris dan Direksi Terhadap Laba Perusahaan, dengan Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* (Vol. 16 No. 2 Desember, 21–39).
- [34] Muslih, M. (2018). The Benefit of Enterprise Risk Management (ERM) On Firm Performance. *Indonesian Management and Accounting Research* (Vol 17 No. 2).
- [35] Muslih, M. (2019). Pengaruh Organ Komisaris Terhadap Kinerja BUMN Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Masuk Klasifikasi LQ 45. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.
- [36] Muslih, M. (2019). The Committee Of Audit Role On The State-Owned Enterprises (BUMN ) Performance Of Indonesia Registered On The Stock Exchange Of Indonesia. *International Journal Of Contemporary Accounting*.
- [37] Muslih, M., Rahadi, DR., Sirait, DS. (2020). Sustainable Governance: Kumpulan Penelitian di Bidang Tata Kelola Perusahaan. Cikarang : PT Filda Fikrindo.
- [38] Muslih, M., Arsyah, RJ. (2020). The Role of Performance Measurement Criteria for Superior Performance (KPKU) and Corporate Governance on SOE Performance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* ( ISSN 2289-1560), *International Journal of Business, Economics, and Law* (ISSN 2289-1552).
- [39] Muslih, M. (2020). *Tata Kelola Berkelanjutan Bagi BUMN Bidang Keuangan Non Publik*. *Firm Journal of Management Studies* (Vol 4 No.2).
- [40] Muslih, M., Umar, H. (2020). The role of ethics and religion to reduce the corruption level in Indonesia, moderated by the government internal control system. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*. Regular Issue April/May Issue.
- [41] Muslih, Mochamad, Sirait, Diah Septaria, Simanjuntak, Daulat Freddy. (2020). The Effect of Financing Decisions and Investment Decisions on The Performance of Property Companies, Real estate & Building Construction Registered In Indonesia Stock Exchange Moderated by Corporate Governance and Risk Management with Firm Size as Control Variable. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 22, Issue 1 (August) ISSN 2289-1560.
- [42] Ningsih, Tri Wulan, Titisari, Kartika Hendra, Nurlaela, Siti. (2017). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Performance*.
- [43] N, Sujatha, M., Muninarayanappa, Sathyanarayana. A Role Of Audit Committee And Its Impact On Firm Performance In India. *International Journal of Development Research* Vol. 07, Issue, 10, pp.15862-15865, October, 2017.
- [44] Nuresa, Ardena ., Hadiprajitno, Basuki. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* vol.02 , ISSN, 2337-3806, tahun 2013.
- [45] Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- [46] Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris

- Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- [47] Prayanthi,Ika, Laurens,Christine Natalia. (2020). Effect of Boards of Directors, Independent Commissioners, and Commite Audit on Financial Performance in the Food and Beverage Sector. *Klabat Journal of Management*.
- [48] Paramitha, Riyantini Amalia, Rahardjo, Shiddiq Nur. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 3, Nomor 2, tahun 2013.
- [49] Ratna, Dewi Hanifia. (2019). Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan.
- [50] Rupley, Kathleen Hertz., Almer, Elizabeth., Philbrick, Donna. *Audit Committee Effectiveness: Perceptions Of Publik Company Audit Committee Members Post-SOX*. February, 2011.
- [51] Sari, Anisa Mustika, Tugiman, Hiro, Nurbaiti, Annisa. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap kinerja perusahaan.
- [52] Scott, William R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Pearson Canada Inc., 2015.
- [53] Sembiring, Yan Christin Br, Saragih, Afni Eliana. (2019). Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JRAK – Vol. 5 No. 2*.
- [54] Setiono, Grace. (2019). Environmental Accountability sebagai Variabel Mediasi dari Pengaruh Struktur Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Tbk di Indonesia.
- [55] Sujana, I Made Sujana, Yasa, Gerianta Wirawan Yasa, Badera, I Dewa Nyoman Badera. (2017). Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional pada Presistensi Laba Perusahaan Manufaktur.
- [56] Tusek, Boris. (2015). The Influence of The Audit Committee On The Internal Audit Operations in The System of Corporate Governance – Evidence from Croatia. *Economic Research*.
- [57] Zhou, Haiyan., Ansah, Stephen Owusu., Maggina, Anastasia. Board Of Directors, Audit Committee , And Firm Performers: Evidence From Greece. *Journal International Accounting, Auditing, and Taxation, ACCAUD 237*, March, 2018.
- [58] [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id)